

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti di lapangan tentang Peranan Dinas Pendapatan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung Tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung pada hakikatnya sudah melaksanakan peranannya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan PAD Tahun 2013 meliputi perencanaan target PAD, pelaksanaan pemungutan, pengawasan atas penaausahaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 namun belum maksimal, hal ini terbukti dari SDM aparatur Dispenda Kota Bandar Lampung masih sangat lemah dan kurang disiplin, Regulasi tentang PAD yang belum tepat dan masih perlu dispesifikasikan yang berakibat tumpang tindih pemungutan pada objek retribusi yang sama dengan SKPD lain, pemetaan potensi PAD tidak dikaji ulang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan sehingga target TA 2013 tidak tercapai. Selain itu, sarana dan prasarana serta tingkat kesadaran masyarakat yang kurang juga berpengaruh pada tingkat ketercapaian target PAD.

2). Faktor-faktor penghambat peranan Dinas Pendapatan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung Tahun 2013 antara lain:

- a) SDM aparatur Dispenda Kota Bandar Lampung masih sangat lemah dan kurang disiplin sehingga berimbas pada rendahnya kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja.
- b) Regulasi tentang PAD yang belum tepat dan masih perlu dispesifikasikan.
- c) Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Target PAD Tahun Anggaran 2013 terlalu tinggi yakni sebesar Rp. 418.111.740.815 dan tidak dikaji ulang pemetaan potensi PAD sesuai dengan kondisi objektif di lapangan.
- d) Sarana dan Prasarana seperti fasilitas perangkat lunak, fasilitas Ruang kerja yang terlalu sempit, kendaraan operasional pengawasan dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan di instansi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung saran-saran tersebut antara lain:

1. SDM aparatur Dispenda Kota Bandar Lampung dan tingkat kedisiplinan kerja perlu ditingkatkan. Kualitas SDM aparatur Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung penting untuk diperhatikan karena berbanding lurus dengan hasil kerja, selain itu pengawasan terhadap petugas UPTD yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung perlu dilakukan secara rutin dengan survei data langsung ke lapangan.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan diregulasi tentang PAD dan perlu dispesifikasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih

kegiatan pemungutan pada objek retribusi yang sama dengan SKPD lain yang memiliki ruang kerja berbeda.

3. Dispenda perlu lebih menggali sumber-sumber PAD dengan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengekstensifikasi sumber-sumber PAD baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan melihat akurasi data lapangan (pengkajian ulang pemetaan potensi PAD).
4. Dispenda Kota Bandar Lampung sebaiknya menambah sarana dan prasarana seperti fasilitas perangkat lunak, memperluas fasilitas Ruang kerja agar kondusif, kendaraan operasional pengawasan dan sebagainya.